

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF POLITICAL EDUCATION THROUGH PANCASILA AND CIVICS EDUCATION LEARNING IN SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA

Fitri Mahgfiroh

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

fitrimahgfiroh15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pendidikan Politik melalui melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya teknik analisis data dengan model *Miles and Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengembangan materi Pendidikan Politik terdapat dalam Kurikulum sekolah, yakni Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), melalui pemberian berbagai kegiatan dan tugas, seperti melakukan kunjungan, wawancara tokoh masyarakat, kegiatan peliputan pemilu, kegiatan pemilihan OSIS, dan kegiatan sekolah (upacara bendera, pemutaran lagu nasional, dan *workshop*). (2) Metode pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni dengan ceramah, presentasi, diskusi, metode pemberian tugas, *make a match*, portofolio, *mind mapping*, pohon kreatif, teka-teki, klipng dan *modelling*. (3) Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pendidikan Politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi: a) hambatan sarana dan prasarana, seperti tidak adanya Laboratorium PPKn dan terbatasnya buku pegangan peserta didik, b) hambatan organisasional, seperti terbatasnya forum-forum dan lomba-lomba khusus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, c) hambatan anggaran, seperti terbatasnya dana untuk melalukan kegiatan kunjungan, d) hambatan dari guru, seperti terbatasnya waktu untuk menggunakan metode yang bervariasi, dan kesulitan untuk mengajukan usul kepada pihak sekolah, e) hambatan dari peserta didik, seperti perbedaan karakter dan partisipasi dari peserta didik.

Kata Kunci: *Pendidikan Politik, Pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, SMP Negeri 2 Yogyakarta*

ABSTRACT

The aim of this research was to describe the implementation of Political Education through Pancasila and Civics Education Learning in SMP Negeri 2 Yogyakarta. This research was descriptive using qualitative approach. The sampling technique of this research used purposive technique, the data collecting techniques used interview, documentation, and observation. The research data validation used resource triangulation technique. The data analysis used Miles and Huberman model including data reduction, data display, and conclusion. The research results showed: (1) The development of Political Education material was done in school curricula, they

were Curriculum of 2013 (K13) and Curriculum of Educational Unit Level (KTSP), by giving various activities and assignments, such as visits, interview with public figure, election coverage activity, OSIS election activity, and school activities (flag ceremony, national anthem play, and workshop), (2) The learning methods used by Pancasila and Civics Education teachers were lecture, presentation, discussion, assignment, make a match, portfolio, mind mapping, creative tree, puzzle, clipping and modelling, (3) Obstacles in the implementation of Political Education through the learning of Pancasila and Civics Education included: a) facilities and infrastructure obstacles, such as the absence of the PPKn Laboratory and the limited handbook for learners, b) organizational obstacles, such as the limited forums and certain competitions for Pancasila and Civics Education, c) budget obstacles, such as the limited funding for visit activities, d) teacher obstacles, such as limited allocation time to implement various methods, and the difficulty in proposing an idea to school, e) learner obstacles, such as the differences of learner character and participation.

Keywords: *Political Education, Learning, Pancasila and Civics Education, SMP Negeri 2 Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik ibarat dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, dan sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik berdampak besar pada karakteristik pendidikan negara tersebut (M. Sirozi, 2010: 1).

Permasalahannya saat ini adalah, ada kecenderungan program Pendidikan Politik yang diberikan kepada masyarakat masih kurang, seperti tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pendidikan Politik. Ada satu undang-undang yang berisi Pendidikan Politik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut, Pendidikan Politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik,

dan negara, dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan diri untuk melakukan Pendidikan Politik. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dimana negara hanya bersifat memfasilitasi program-program Pendidikan Politik yang dilakukan para agen politik (Winarno, 2014: viii-ix).

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI periode 2014-2019), Bambang Sadono menilai Pendidikan Politik masih minim diberikan oleh pemerintah maupun partai politik kepada masyarakat. Saat ini banyak pemuda yang ikut hanyut dalam arus politik namun berada pada jalur yang salah sehingga hanya menjadi korban. Akibatnya masyarakat menjadi apatis dan menganggap politik sangatlah kotor dan harus dijauhi (Pendidikan

Politik Masih Minim: <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendidikan-politik-masihminim/> diakses pada 13 Januari 2017).

Dengan masih minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada, sudah saatnya masyarakat dibekali dengan Pendidikan Politik, khususnya bagi remaja. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik (Zamroni, 2002: 25).

Pendidikan politik dapat diberikan melalui dua jalur, yakni secara formal dan nonformal. Secara formal, pendidikan politik di berikan melalui lembaga sekolah. Pendidikan Politik di sekolah tidak ditafsirkan secara langsung menghadapkan peserta didik pada tataran politik seperti pada konteks perebutan kekuasaan atau hubungan penguasa dengan yang di kuasai, tetapi dapat dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dengan lebih menonjolkan tumbuhnya budaya positif dalam pergaulan, (Pentingnya Pendidikan Politik di Sekolah:

<http://www.banjarnegarab.go.id/v3/index.php/berita/politik/1309pentingnya-pendidikan-politik-di-sekolah>, diakses pada 13 Januari 2017).

Di sekolah, mata pelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan Politik adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berisi tiga kompetensi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Kedua, ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Ketiga, nilai-nilai kewarganegaraan (*civic disposition*) (Margaret S. Branson dkk, 1999: 4).

Namun, berdasarkan hasil kajian kurikulum dari Pusat Kurikulum (2007) terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekolah menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai muatan Kompetensi Dasar (KD) untuk tiap-tiap Standar Kompetensi (SK) baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni hanya 13,18 % KD yang memuat aspek sikap/afektif, 17,3 % yang memuat aspek perilaku/psikomotor, sedangkan untuk aspek pengetahuan/kognitif sebesar 67,97%.

Selain itu, berdasarkan hasil kajian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai kompetensi pedagogik dan profesional guru di 56 sekolah, yang dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tahun 2007

menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seperti kegiatan pembelajaran masih bersifat konvensional, atau masih berpusat pada guru, kurang mendorong peserta didik mengembangkan potensi, dan cenderung menekankan pada penyampaian materi pelajaran, serta lebih menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan (Winarno, 2013: 85).

Dengan demikian, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salah satunya adalah dari guru. Dalam hal ini, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan dan wawasannya baik dalam mengembangkan materi, metode, dan media pembelajaran agar dapat membentuk kesadaran politik peserta didik.

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang mencoba melihat bagaimana implementasi Pendidikan Politik; 1) Penelitian yang dilakukan oleh Lensa Reza Satria dari Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta dengan skripsi berjudul “Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik di SMA Negeri se-Kabupaten Kulon Progo”, 2) Penelitian yang dilakukan oleh Juanda dari

Universitas Pendidikan Indonesia dengan tesis berjudul “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Perilaku Memilih Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012”, 3) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyuningsih dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan skripsi berjudul “Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkal Pinang”, dsb.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada belum diketahui dengan jelas bagaimana pengimplementasian Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, “bagaimana pengembangan materi-materi Pendidikan Politik oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta?”, apa saja metode pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan Pendidikan Politik di SMP Negeri 2 Yogyakarta?”, dan apa saja hambatan dalam mengimplementasikan Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan materi-materi Pendidikan Politik oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta, menguraikan metode pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan Pendidikan Politik di SMP Negeri 2 Yogyakarta, serta menganalisis hambatan dalam mengimplementasikan Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta.

Salah satu jalur yang memberikan Pendidikan Politik ialah lembaga sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri, termuat tiga kompetensi dasar yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic disposition*).

Materi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termuat dalam kompetensi dasar yang sekaligus berisi Pendidikan Politik meliputi materi 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik, metode yang digunakan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik dalam proses pembelajaran serta mengarahkan peserta didik bersikap dengan pendekatan *scientific*, atau pendekatan berbasis proses keilmuan, yang dilaksanakan melalui strategi pembelajaran kontekstual, dengan metode *discovery learning*, *inquiry learning*, *problem-based learning*, dan *project-based learning* (buku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kurikulum 2013, 2016: 14).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai bagaimana implementasi Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta.

Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian yang memiliki kewenangan, pengetahuan,

pengalaman, dan informasi serta terlibat dalam implementasi Pendidikan Politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi seorang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dua peserta didik.

Teknik yang digunakan dalam oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dimana dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan garis besar pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai arsip seperti Program Tahunan, Program Semester, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas 7, 8, dan, dokumen pendukung lainnya.

Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian, hasil yang diperoleh dari dokumentasi, dan hasil observasi yang diikuti. Analisis data pada penelitian ini merujuk pada analisis data kualitatif model Miles and Huberman (Sugiyono, 2013: 247-

252), berdasarkan model tersebut ada tiga langkah dalam melakukan analisis data yaitu; a) *Data reduction* (Reduksi data), b) *Data display* (Penyajian data), c) *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan materi Pendidikan Politik oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut.

a) Materi Pendidikan Politik dalam Kurikulum 2013

Di kelas 7 yang menggunakan Kurikulum 2013, materi Pendidikan Politik tersebar secara menyeluruh (komprehensif). Materi Pendidikan Politik meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b) Materi Pendidikan Politik dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Untuk kelas 8 dan 9 yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi Pendidikan Politik tersebar secara parsial (saling berhubungan). Materi Pendidikan Politik meliputi Pancasila, Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan,

Demokrasi, Kedaulatan, Bela Negara, Otonomi daerah, dan Globalisasi.

Pengembangan materi-materi Pendidikan Politik dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta untuk mengembangkan materi-materi Pendidikan Politik sebagai berikut.

1) *Pengembangan materi Pancasila dan NKRI*

Untuk mengembangkan materi Pancasila dan sejarah NKRI, guru mengajak peserta didik untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, seperti Museum Benteng Vredenburg, Museum Perjuangan Yogyakarta, dan Gedung Agung.

2) *Pengembangan materi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan*

Untuk mengembangkan materi ini, guru memanfaatkan buku dan media massa. Dalam materi konstitusi, peserta didik ditugaskan untuk mencari di buku maupun internet, kemudian mendiskusikan dan menganalisisnya, yakni dengan membandingkan perbedaan antara konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Untuk materi peraturan perundang-undangan mereka juga ditugaskan untuk mencari dan membandingkan antara tata urutan perundang-undangan dalam TAP MPR

Nomor III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3) *Pengembangan materi Konsep warga negara dan Demokrasi*

Untuk mengembangkannya, guru memberikan tugas kepada peserta didik baik secara berkelompok maupun individu, seperti wawancara tokoh masyarakat, kegiatan peliputan Pemilu, dan pemilihan OSIS.

4) *Pengembangan pada materi Multikulturalisme*

Untuk mengembangkan materi multikulturalisme, guru memberikan tugas dan melakukan kunjungan ke tempat bersejarah ke Museum Negeri Sonobudoyo untuk mengenalkan sejarah manusia dan kebudayaan.

Kegiatan tersebut digunakan untuk mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang dikembangkan seperti bagaimana konsep manusia dan sejarah kebudayaan di Indonesia.

Selain melalui pengembangan materi tersebut di atas, beberapa kegiatan yang dimiliki sekolah juga dimanfaatkan untuk mengembangkan Pendidikan Politik seperti

Upacara Bendera, Pemutaran Lagu Nasional, dan Workshop.

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan Pendidikan Politik

Adapun metode yang dipakai oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta sebagai berikut.

a. Ceramah

Metode ceramah merupakan metode dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara lisan. Metode ceramah yang digunakan ialah ceramah bervariasi. Kaitannya dengan pengetahuan kewarganegaraan tentang Pendidikan Politik yang disampaikan dengan ceramah yakni materi Pancasila, demokrasi, kedaulatan, warganegara, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

b. Diskusi

Diskusi digunakan agar peserta didik dapat saling bertukar pendapat, serta memberikan masukan berupa usulan dan saran. Materi-materi yang di diskusikan misalnya, HAM, konstitusi, peraturan perundang-undangan, lembaga negara dan sebagainya.

c. Presentasi

Presentasi digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi, maupun oleh peserta didik untuk memaparkan hasil tugas atau

diskusi. Materi Pendidikan Politik yang dipresentasikan seperti pada materi demokrasi.

d. Metode Pemberian Tugas

Tugas yang diberikan guru meliputi tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Tugas yang terkait dengan Pendidikan Politik dalam tugas terstruktur misalnya pembuatan kliping penerapan dan peyimpangan nilai-nilai Pancasila, kliping mengenai lembaga-lembaga negara, sedangkan tugas tidak terstruktur misalnya tugas merangkum materi sejarah NKRI, tugas wawancara dengan pejabat negara dan sebagainya.

e. Make A Match

Metode ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami materi yang telah disampaikan. Untuk materi Pendidikan Politik yang dengan metode ini ialah kedaulatan.

f. Portofolio

Portofolio merupakan suatu kumpulan hasil penulisan, pengamatan, dan pencarian informasi dari peserta didik. Tema yang dijadikan sebagai bahan pembuatan portofolio berkaitan dengan Pendidikan Politik yakni mengenai warga negara.

g. Mind Mapping (Peta Konsep)

Mind mapping (Peta Konsep) merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang

digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi materi dengan pemetaan pikiran. Materi yang dijadikan mind mapping kaitannya dengan Pendidikan Politik misalnya wilayah-wilayah dalam NKRI.

h. Pohon Kreatif

Pohon kreatif ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peserta didik. Materi Pendidikan Politik yang dijadikan untuk bahan pembuatan pohon kreatif ini seperti materi demokrasi dan kedaulatan.

i. Teka-Teki

Teka-teki ada yang dibuat oleh peserta didik secara individu maupun berkelompok, ada pula yang dibuat oleh guru. Contoh materi Pendidikan Politik yang dijadikan bahan ialah tentang kedaulatan.

j. Kliping

Kliping merupakan guntingan artikel dan berita yang dikumpulkan dalam sebuah laporan, dengan memanfaatkan koran dan media massa lainnya, seperti internet dan majalah. Contoh pembuatan kliping yang diberikan kepada peserta didik kaitannya dengan Pendidikan Politik misalnya kliping penyimpangan dalam pemilu, penerapan dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila, lembaga tinggi negara, dan sebagainya.

k. Modelling

Selain melalui metode-metode pembelajaran, perbuatan guru baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

1) Keteladanan

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan motivasi dan inspirasi melalui pengalaman guru selama ini. Contoh pemberian motivasi yang diberikan kaitannya dengan Pendidikan Politik seperti hak dan kewajiban sebagai warga negara, khususnya sebagai anak, hak dan kewajiban seorang pelajar, dan sebagainya.

2) Pendisiplinan

Dalam membentuk kedisiplinan peserta didik, guru memulainya dari hal-hal yang kecil. Misalnya guru datang tepat waktu baik ke sekolah maupun saat akan mengajar. Pengumpulan tugas sesuai perjanjian yang telah dibuat dan jika ada yang terlambat atau tidak mengumpulkan akan mendapatkan hukuman. Saat pembelajaran, peserta didik yang ramai ataupun memainkan HP dipanggil dan dicatat dalam buku catatan khusus guru.

3) Pembiasaan

Pembiasaan yang dilakukan misalnya dengan penyambutan peserta didik setiap pagi digerbang sekolah sembari memberikan salam dan berjabat tangan, berdo'a sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, mengarahkan

untuk beribadah sesuai keyakinan, pelaksanaan ibadah sholat (dhuhur, duha, Jum'at) secara berjamaah, pembiasaan membaca dan menyanyikan lagu nasional. Pembiasaan ini kaitannya dengan Pendidikan Politik agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan karakter peserta didik.

Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. *Hambatan Sarana dan prasarana*, yakni hambatan yang terjadi karena adanya keterbatasan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk menunjang proses pembelajaran seperti belum adanya Laboratorium PPKn, dan terbatasnya buku pegangan peserta didik.
- b. *Hambatan organisasional*, yakni hambatan yang terjadi dalam hal mekanisme internal organisasi membatasi upaya untuk mengatasi, seperti belum ada forum-forum yang menaungi untuk perlombaan khusus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. ada yang tidak sesuai

dengan asas dalam pemilu yang harusnya luberjurdil.

- c. *Hambatan anggaran*, yakni hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, seperti terbatasnya dana untuk melakukan kerjasama dan kunjungan.
- d. *Hambatan dari Guru*, seperti terbatasnya waktu untuk menggunakan metode yang bervariasi, dan sulitnya mengajukan usul kepada pihak sekolah untuk mengadakan kunjungan maupun karyawan.
- e. *Hambatan dari Peserta Didik*, seperti perbedaan partisipasi dan karakter peserta didik. Ada yang sangat aktif berpartisipasi, ada juga yang secara diam-diam menggambar atau mengobrol dengan teman, ada yang menolak mengerjakan tugas dan sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pendidikan Politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta termuat dalam Kurikulum yang diterapkan sekolah, yakni dalam Kurikulum 2013 (K13) maupun dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di kurikulum 2013, materi Pendidikan Politik antara lain: Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan

- Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Di Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) materi Pendidikan Politik antara lain: Pancasila, Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan, Demokrasi, Kedaulatan, Bela Negara, Otonomi Daerah, dan Globalisasi.
2. Metode pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan Pendidikan Politik di SMP Negeri 2 Yogyakarta yakni dengan ceramah, presentasi, diskusi, metode pemberian tugas, *make a match*, portofolio, *mind mapping*, pohon kreatif, teka-teki, klipng dan *modelling*.
 3. Hambatan dalam mengimplementasikan Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta meliputi: a) hambatan sarana dan prasarana, seperti tidak adanya Laboratorium PPKn dan terbatasnya buku pegangan peserta didik, b) hambatan organisasional, seperti masih terbatasnya forum-forum dan lomba-lomba khusus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, c) hambatan anggaran, seperti terbatasnya dana untuk melakukan kegiatan karyawisata dan kunjungan, d) hambatan dari guru, seperti terbatasnya

waktu untuk melaksanakan metode yang bervariasi, dan sulitnya mengajukan usul kepada pihak sekolah, e) hambatan dari peserta didik, seperti perbedaan karakter dan partisipasi dari peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Derap Serayu. 2015. *Pentingnya Pendidikan Politik di Sekolah*. <http://www.banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita/politik/1309-pentingnya-pendidikan-politik-di-sekolah>. Diakses pada 13 Januari 2017, pukul 20:03 WIB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Margaret S Branson, dkk. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial *The Asia Foundation*.
- M, Sirozi. 2010. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Semarang Metro. 2015. *Pendidikan Politik Masih Minim*.
<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendidikan-politik-masih-minim/>.
Diakses pada 13 Januari 2017, pukul 19: 36 WIB.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

———. 2014. *Seri Pendidikan Politik Buku 1: Pancasila & UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Ombak.

Zamroni. 2002. *Pendidikan Untuk Demokrasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.